

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN KERJA
TENAGA KERJA TERAMPIL KONSTRUKSI**

TESIS

Oleh :

Rivelino

2013831031

Pembimbing :

Dr. Ir. Anton Soekiman, MT, M.Sc



**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
KERJASAMA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN
KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG
JANUARI 2017**



HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN KERJA TENAGA
KERJA TERAMPIL KONSTRUKSI**

Oleh :

**Rivelino
2013831031**

**Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal :
Sabtu ,21 Januari 2017**

Pembimbing :



Dr. Ir. Anton Soekiman, MT, M.Sc



**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
KERJASAMA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN
KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG
JANUARI 2017**



LEMBAR PENGUJI

SIDANG UJIAN TESIS

Hari/Tanggal :Sabtu, 21 Januari 2017


Oleh :

Rivelino

2013831031

PERSETUJUAN TESIS

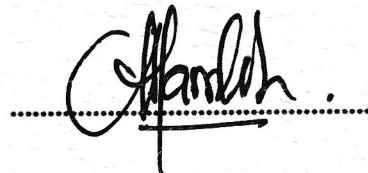
1. **Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc**
Pembimbing


.....

2. **Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, M.Sc**
Penguji


.....

3. **Amir Hamzah, ST., MT.**
Penguji


.....

**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
KERJASAMA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN
KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG
JANUARI 2017**





PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut :

Nama : Rivelino
Nomor Pokok Mahasiswa : 2013 83 1031
Program Studi : Manajemen Proyek Konstruksi Program
Pasca Sarjana Univeritas Katolik
Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul :

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN KERJA TENAGA
KERJA TERAMPIL KONSTRUKSI**

Adalah benar – benar karya saya sendiri dibawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan

Dinyatakan : Bandung

Tanggal : 21 Januari 2017



Rivelino



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN SERTIFIKASI KETERAMPILAN KERJA TENAGA KERJA TERAMPIL KONSTRUKSI

Rivelino (NPM : 2013831031)

Pembimbing : Dr. Ir. Anton Soekiman, MT, M.Sc

Magister Teknik Sipil

Manajemen Proyek Konstruksi

Bandung

ABSTRAK

Tenaga kerja yang telah dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat sebagai bukti kompetensi. Sertifikat itu berfungsi sebagai bukti kompetensi, maka pemegang sertifikat akan memperlakukan sertifikat sebagai bagian dari kebanggaan diri, bukti kemampuan sekaligus pengakuan terhadap keilmuan yang dimilikinya. Penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang disebarakan kepada para pemimpin pelaksana proyek konstruksi Bina Konstruksi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, LPJKN, LPJKD Prov. DKI Jakarta, USTK Prov. DKI Jakarta, Asosiasi/Institusi Diklat, Asessor, dan Tenaga Terampil Konstruksi selanjutnya data dianalisis menggunakan FI (*Frequency Index*) untuk meranking faktor-faktor, selanjutnya dilakukan merekap data wawancara responden. Secara umum, variabel yang digunakan dalam proses registrasi dan sertifikasi antara lain Kewenangan LPJK dalam Pelaksanaan Registrasi dan Sertifikasi, Keterlibatan LPJK dalam Prosedur Registrasi dan Sertifikasi, Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Registrasi dan Sertifikasi, Prosedur Pelaksanaan Registrasi dan Sertifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor yang paling mempengaruhi Sertifikat menjadi syarat untuk dapat bekerja pada proyek pemerintah, Selalu melakukan pengarsipan pemohon SKA/SKTK, Unsur-unsur pembentuk USTK sudah sesuai dengan peraturan/pedoman LPJKN Nasional, USTK memiliki skema sertifikasi, Pembayaran biaya SKTK ke LPJK berjalan lancar dan Asosiasi/Institusi diklat memiliki SKKNI, Asesor selalu dilengkapi dengan surat tugas, Sertifikat dapat membuat saya diakui di pekerjaan dan Sertifikat dapat meningkatkan kompetensi saya. Setelah dianalisis dengan menggunakan metode *Frequency Index* dilakukan pemberian rekomendasi untuk memperbaiki dari faktor-faktor dalam pelaksanaan registrasi dan sertifikasi. Hasil dan temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi kepada para pemangku kepentingan sebagai bahan informasi dan langkah solusi untuk memperbaiki penerapan pada registrasi dan sertifikasi.

Kata kunci : Proses Sertifikasi, Skala Likert, Frequency Index.

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION CERTIFICATION OF SKILLED MANPOWER EMPLOYMENT SKILLS CONSTRUCTION

Rivelino (NPM : 2013831031)

Advisor : Dr. Ir. Anton Soekiman, MT, M.Sc

Master of Civil Engineering

Construction Project Management

Bandung

ABSTRACT

Labor has been declared competent will obtain a certificate as proof of competence. The certificate serves as proof of competency, the holder of the certificate will treat the certificate as part of self-esteem, evidence of the capability and the recognition of its science. Of the research conducted through a questionnaire distributed to the leaders of the project implementers construction was Bina Construction at the Ministry of Public Works and public housing, LPJK, LPJKD Prov. Jakarta, USTK Prov. Jakarta, Associations / Institutions Training, assessor, and Skilled Construction analyzed the data further by using FI (Frequency Index) to rank the factors, then performed the data recap interview respondents. In general, the variables used in the process of registration and certification among others Registration Authority LPJK in the Implementation and Certification, LPJK involvement in the Registration and Certification Procedures, Policy Implementation Implementation of Registration and Certification, Registration and Certification Implementation Procedures. Based on the survey results revealed the factors that most influence the Certificate is a requirement to be able to work on government projects, always perform archiving applicant SKA / SKTK, elements forming USTK are in accordance with the rules / guidelines LPJKN National, USTK have certification schemes, payment of the cost SKTK to LPJK runs smoothly and Associations / Institutions training has SKKNI, Assessor always comes with a letter of assignment, certificates can make my work recognized and certificates can improve my competence. Having analyzed using the methods Frequency Index be giving advice on repair of the factors in the application of the registration and certification. Results and findings from this study are expected to be recommendations to the stakeholders for information and solutions to improve the implementation of measures on registration and certification.

Keywords : Certification Process, Likert Scale, Frequency Index



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sertifikasi Keterampilan Kerja Tenaga Kerja Terampil Konstruksi**”. Penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil, konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi kerjasama Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan.

Pelaksanaan penelitian sampai pada penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Anton Soekiman, MT., M.Sc. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, M.Sc sebagai dosen pembahas yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan dan perbaikan tesis ini;
3. Bapak Amir Hamzah, ST., MT. sebagai dosen pembahas yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan dan perbaikan tesis ini;
4. Seluruh dosen program pascasarjana magister teknik sipil khususnya dosen manajemen proyek konstruksi yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu manajemen proyek konstruksi;
5. Pimpinan dan staf Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Pimpinan serta Rekan kerja, sahabat yaitu Dimas Bayu Susanto, ST., MPSDA Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas yang membantu dan menjadi narasumber dalam penelitian ini;
7. Orang tua tercinta Bapak Ir. Tito Latief, Ibu Elselina yang selalu memberi dukungan dan doa selama ini kepada penulis;
8. Pimpinan, staf dan karyawan Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung;
9. Sahabat-sahabat Karyasiswa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Magister Teknik Sipil Program Manajemen Proyek Konstruksi angkatan 2013 terutama Moses siburian dan Parlagutan siregar yang telah memberikan ide dalam menulis, maupun adik kelas yang selalu menemani penulis berdiskusi;
10. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu untuk penyelesaian tesis dan studi ini “*jajakumullah khairan katsihron*”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik positif dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaan tesis ini merupakan kehormatan bagi penulis. Demikianlah tesis ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandung, Januari 2017
Penulis

Rivelino



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERSETUJUAN TESIS	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan	10
1.3.2 Manfaat	11
1.4. Ruang Lingkup Pembahasan.....	12
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1. Lisensi dan Sertifikasi Profesi Menurut para Ahli	15
2.2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	17

2.2.1	Tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).....	20
2.2.2	Fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).....	21
2.2.3	Wewenang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).....	22
2.2.4	Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK)	23
2.2.5	Asosiasi Profesi/Institusi Diklat	24
2.2.6	Kesekretariatan Lembaga.....	25
2.3.	Sertifikasi dan Registrasi Menurut Peraturan Perundangan.....	25
2.4	Landasan Hukum Proses Sertifikasi dan Registrasi	29
2.5	Klasifikasi dan Kualifikasi dari Sertifikasi	30
2.6	Biaya Sertifikasi.....	33
2.7	Tinjauan Umum Tentang Proyek Konstruksi.....	34
2.7.1	Pengertian Proyek.....	34
2.7.2	Karakteristik Proyek Konstruksi.....	39
2.7.3	Pihak-Pihak Terkait Proyek Konstruksi.....	39
2.7.3	Manajemen Proyek Konstruksi	42
2.8.	Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia	43
2.9.	Peran Tenaga Kerja Konstruksi dalam Persaingan Usaha	46
2.10	Penelitian Terdahulu	48
2.11	Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu yang Terkait Langsung	61
2.12	Statistik dan Peranannya dalam Penelitian	62
2.12.1	Metode dan Instrumen Pengumpulan Data	63
2.12.2	Teknik Pengujian Validitas dan Reliabilitas	64
2.13	Analisis Deskriptif	65
2.13	Analisis Data	66

BAB 3 METODE PENELITIAN.....	67
3.1. Metode Penelitian.....	67
3.2. Lokasi Penelitian	71
3.3. Jenis Data Penelitian.....	71
3.4. Metode Pengumpulan Data	72
3.4.1 Wawancara	72
3.4.2 Kuisisioner Penelitian	72
3.5. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	73
3.6. Responden Penelitian.....	76
3.7. Perumusan Variabel.....	78
3.8. Perumusan Indikator Penilaian.....	79
3.9. Deskripsi Masing-Masing Indikator Penilaian.....	105
3.10 Analisis Hasil dan Pembahasan.....	125
3.10.1 Pemingkatan indikator penilaian dalam Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi Terampil	125
3.10.2 Uji Normalitas.....	127
3.11. Kesimpulan dan Rekomendasi	128
BAB 4 PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	129
4.1. Pemilihan Strategi Penelitian	129
4.2. Validitas dan Reliabilitas Responden	130
4.2.1 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Responden	130
4.3. Pengumpulan Data.....	134
4.4 Deskripsi Data Umum Responden	134
4.4.1 Deskripsi Pendidikan Terakhir Responden.....	135

4.4.2	Deskripsi Pengalaman Responden.....	135
4.5	Pemeringkatan Berdasarkan Fakta Lapangan dalam Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi	137
4.5.1	Peringkat Indikator menurut Ditjen Bina Konstruksi.....	139
4.5.2	Peringkat Indikator menurut LPJKN.....	142
4.5.3	Peringkat Indikator menurut LPJKD Provinsi DKI Jakarta.....	144
4.5.4	Peringkat Indikator menurut USTK Provinsi DKI Jakarta	147
4.5.5	Peringkat Indikator menurut Asosiasi Profesi/Institusi Diklat.....	150
4.5.6	Peringkat Indikator menurut Asesor.....	152
4.5.7	Peringkat Indikator menurut Tenaga Terampil Konstruksi	155
4.6	Identifikasi dari RUU Jasa Konstruksi 15 Desember 2016.....	158
4.7	Hasil Pengumpulan Data	162
4.7.1	Data Wawancara dengan Ditjen Bina Konstruksi.....	168
4.7.2	Data Wawancara dengan LPJKN.....	168
4.7.3	Data Wawancara dengan LPJKD Prov. DKI Jakarta	170
4.7.4	Data Wawancara dengan USTK Prov. DKI Jakarta	172
4.7.5	Data Wawancara dengan Asosiasi Profesi/Institusi diklat	174
4.7.6	Data Wawancara dengan Asesor.....	178
4.7.7	Data Wawancara dengan Tenaga Terampil Konstruksi	181
4.8	Rekomendasi untuk Peningkatan Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi.....	185
	BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	189
5.1	Kesimpulan	189
5.2	Saran	195
	DAFTAR PUSTAKA	197



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia	5
Gambar 1.2 Jumlah Tenaga Terampil yang sudah tersertifikasi tahun 2013-2014.....	7
Gambar 1.3 Hasil Kuesioner Penyebab Rendahnya Kepemilikan SKA (Sumber: Buku Konstruksi Indonesia (2012).....	9
Gambar 2.1 Diagram Alir Proses Sertifikasi dan Registrasi	28
Gambar 2.2 Mekanisme Perpanjangan & Permohonan Baru SKA/SKTK Melalui Asosiasi Penerima Wewenang.....	28
Gambar 2.3 Pohon peraturan terkait Sertifikasi dan Registrasi (Sumber : Harry Purwantara, 2013).....	29
Gambar 2.4 Ruang Lingkup USTK Provinsi Peraturan LPJK.....	32
Gambar 2.5 Pihak-Pihak Terkait Pelaksanaan Proyek Konstruksi.....	41
Gambar 2.6 <i>Competitiveness strategies</i> dari perusahaan konstruksi.....	47
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	71
Gambar 3.2 <i>Skala Likert</i> untuk skor penilaian persepsi dari pelaksanaan sertifikasi dan registrasi.....	127
Gambar 4.1 Pie Chart Presentase Responden berdasarkan Jenis institusi / Perusahaan.....	135
Gambar 4.2 <i>Pie Chart</i> Persentase Responden menurut Tingkat Pendidikan...	136
Gambar 4.3 <i>Pie Chart</i> Persentase Responden menurut Pengalaman	136
Gambar 4.4 <i>Skala Likert</i> untuk Skor Penilaian Indikator	136
Gambar 4.5 Grafik Peringkat Indikator Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi menurut Ditjen Bina Konstruksi.....	136

Gambar 4.6 Grafik Peringkat Indikator Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi menurut LPJKN.....	136
Gambar 4.7 Grafik Peringkat Indikator Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi menurut LPJKD Prov. DKI Jakarta.....	136
Gambar 4.8 Grafik Peringkat Indikator Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi menurut USTK Prov. DKI Jakarta.....	136
Gambar 4.9 Grafik Peringkat Indikator Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi menurut Asosiasi Profesi/Institusi Diklat.....	136
Gambar 4.10 Grafik Peringkat Indikator Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi menurut Dari Asesor.....	136
Gambar 4.11 Grafik Peringkat Indikator Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi menurut Dari Tenaga Terampil Konstruksi.....	136



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Pendidikan (2008-2013)	6
Tabel 1.2	Perbandingan Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi dengan Jumlah Badan usaha	7
Tabel 2.1	Klasifikasi dan Kualifikasi SKA dan SKTK yang ditetapkan oleh LPJK.....	32
Tabel 2.2	Rincian Biaya Permohonan Baru dan Perubahan SKTK untuk setiap subklasifikasi.....	33
Tabel 2.3	Rincian Biaya Perpanjangan SKTK untuk setiap subklasifikasi	34
Tabel 2.4	Kompetensi Kerja menurut Konvensi Nasional SKKNI.....	45
Tabel 2.5	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Konstruksi Untuk Memiliki SKA/SKTK Pada Kontraktor di Kabupaten Badung oleh (Jelantik, et al., 2014).....	49
Tabel 2.6	Hambatan Tenaga Terampil Dalam memperoleh Sertifikat Keterampilan di bidang Jasa Konstruksi oleh (Soekiman, Fitri, 2014).....	50
Tabel 2.7	Harmonisasi Rantai Pasok Konstruksi : Konsepsi, Inovasi dan Aplikasi di Indonesia oleh (Kesai, Arifin, 2012).....	51
Tabel 2.8	Terobosan Kebijakan Dan Konsolidasi Para Pemangku Kepentingan Untuk Masa Depan Tenaga Terampil Konstruksi Indonesia oleh (Masriyanto, Saputro, 2014).	52
Tabel 2.9	Identifikasi Proses sertifikasi dan registrasi Tenaga Kerja Konstruksi Terampil.....	53

Tabel 2.11	Perbandingan Perbandingan Penelitian Terdahulu yang Terkait Langsung.....	61
Tabel 2.12	Peringkat FI.....	66
Tabel 3.1	Bentuk Pertanyaan penelitian.....	68
Tabel 3.2	Pilihan Jawaban Responden.....	73
Tabel 3.3	Responden Kuesioner	76
Tabel 3.4	Responden Penilai Ahli	77
Tabel 3.5	Proses Seleksi Indikator yang Digunakan untuk mengevaluasi Proses Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi	79
Tabel 3.6	Proses Seleksi Tahap Kedua Indikator Penilaian dalam Evaluasi Proses Sertifikasi dan Registrasi	95
Tabel 3.7	Nilai Interpasi Skala <i>Likert</i> untuk penilaian dan pendapat responden mengenai indikator pelaksanaan sertifikasi dan registrasi	126
Tabel 4.1	Profil Pakar	131
Tabel 4.2	Reliabilitas dari masing-masing Responden.....	133
Tabel 4.3	Data Pengumpulan Kuesioner dari Responden.....	133
Tabel 4.4	Peringkat Indikator Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi menurut Ditjen Bina Konstruksi	133
Tabel 4.5	Peringkat Indikator Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi menurut LPJKN	133
Tabel 4.6	Peringkat Indikator Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi menurut LPJKD Provinsi DKI Jakarta.....	133
Tabel 4.7	Peringkat Indikator Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi menurut USTK Provinsi DKI Jakarta	133

Tabel 4.8	Peringkat Indikator Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi menurut Asosiasi Profesi/Institusi Diklat.....	133
Tabel 4.9	Hasil Peringkat Indikator Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi menurut Kelompok Asesor.....	133
Tabel 4.10	Hasil Peringkat Indikator Pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi menurut Tenaga Terampil Konstruksi.....	133
Tabel 4.11	Identifikasi dari RUU Jasa Konstruksi 15 Desember 2016.....	133
Tabel 4.12	Hasil Wawancara dengan Ditjen Bina Konstruksi.....	133
Tabel 4.13	Hasil Wawancara dengan LPJKN.....	133
Tabel 4.14	Hasil Wawancara dengan LPJKD Prov. DKI Jakarta.....	133
Tabel 4.15	Hasil Wawancara dengan USTK Prov. DKI Jakarta	133
Tabel 4.16	Hasil Wawancara dengan Asosiasi Profesi/Institusi Diklat	133
Tabel 4.17	Hasil Wawancara dengan Asesor.....	133
Tabel 4.18	Hasil Wawancara dengan Tenaga Terampil Konstruksi	133
Tabel 4.19	Rekomendasi terhadap variabel dari pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi	133



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	:	DAFTAR KUISIONER
LAMPIRAN II	:	REKAPITULASI HASIL JAWABAN RESPONDEN
LAMPIRAN III	:	REKAPITULASI HASIL <i>Reliabilitas</i> yang mempengaruhi perencanaan sertifikasi keterampilan kerja tenaga kerja terampil konstruksi menurut Tenaga Terampil Konstruksi
LAMPIRAN IV	:	PERLEM SISTEM INFORMASI KONSTRUKSI INDONESIA



DAFTAR SINGKATAN

BPS	:	Badan Pusat Statistik
DJBK	:	Dirjen Bina Konstruksi
LPJK	:	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
LPJKN	:	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
MP3EI	:	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
PP	:	Peraturan Pemerintah
PMBOK	:	<i>Project Management Of Body Knowledge</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SKKNI	:	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKA	:	Sertifikat Keahlian
SKTK	:	Sertifikat Keterampilan Kerja
UUJK	:	Undang-Undang Jasa Konstruksi
UU	:	Undang-Undang
USTK	:	Unit Sertifikasi Tenaga Kerja
USBU	:	Badan Usaha Jasa Konstruksi
UJK	:	Uji Kompetensi
MTU	:	<i>Mobile Training Unit</i>

TUK	:	Tempat Uji Kompetensi
RCC	:	<i>Recognition Competency</i> / Pengakuan Kompetensi
LPJKP	:	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi
CPD	:	<i>Continuing Professional Development</i>
RUU	:	Rancangan Undang-Undang



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bidang jasa konstruksi di Indonesia merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam perekonomian Indonesia terutama soal infrastruktur yang baik dan berkualitas dalam memajukan suatu wilayah (Menteri PU Djoko Kirmanto, Pos Kota, 2011). Berbicara soal potensi bisnis yang mungkin dapat digarap oleh pelaku jasa konstruksi nasional, tidak saja pasar yang ada di dalam negeri tapi juga potensi yang ada di luar negeri seperti pasar di ASEAN, Timur Tengah, hingga mancanegara. Memang salah satu hal yang menjadi perhatian kita adalah menyangkut kesiapan SDM (Sumber Daya Manusia) yang pada akhirnya menjadi ujung tombak guna menggapai pasar di sektor konstruksi yang semakin besar dari waktu ke waktu.

Kesiapan tenaga kerja konstruksi di suatu negara sangatlah penting dalam menunjang proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kenyamanan lingkungan terbangun (*sustainable construction towards the finest built environment*). Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menuntut ketersediaan tenaga kerja atau SDM konstruksi yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang memadai. Tenaga kerja yang kompeten ditandai dengan adanya kemampuan terhadap pengetahuan sesuai pekerjaannya, keterampilan ataupun keahlian yang diperoleh dari pengalamannya selama ini, serta memiliki sikap kerja atau perilaku yang baik sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja yang ditetapkan dalam UU

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi secara berkelanjutan CPD (*Continuing Professional Development*) pada level ahli maupun terampil diperlukan guna memenuhi kebutuhan SDM konstruksi baik untuk pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, tenaga kerja konstruksi Indonesia harus mampu menunjukkan kemampuan dan kekuatannya untuk mendukung sektor konstruksi yang inovatif serta berdaya saing, sehingga para investor maupun kontraktor dari luar negeri tidak perlu ragu dalam memperoleh tenaga kerja konstruksi Indonesia yang dapat menunjang pelaksanaan investasi maupun pekerjaan konstruksi di Indonesia maupun di luar negeri.

Kebanyakan tenaga kerja konstruksi di Indonesia merupakan tenaga ahli dan tenaga terampil yang belum memiliki sertifikat dan pengalaman. Sebagian besar tenaga kerja konstruksi terampil berpendidikan sekolah dasar ke bawah, dan sebagian kecil saja yang berpendidikan akademi. Masalah yang timbul adalah banyak diantara para pekerja tersebut tumbuh dan berkembang tanpa melalui proses yang didukung oleh pengetahuan keteknikan yang cukup. Mereka dominan berasal dari masyarakat yang bercirikan tradisional. Banyak hambatan yang akan mereka temui di era persaingan global sehingga menuntut dinamika kerja tinggi, baik dari sisi kemampuan teknologi maupun kemampuan bisnis dan manajerial. Guna membuat usaha jasa konstruksi di Indonesia menjadi kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas, setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi (LPJK). Hal ini merupakan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 (UUJK).

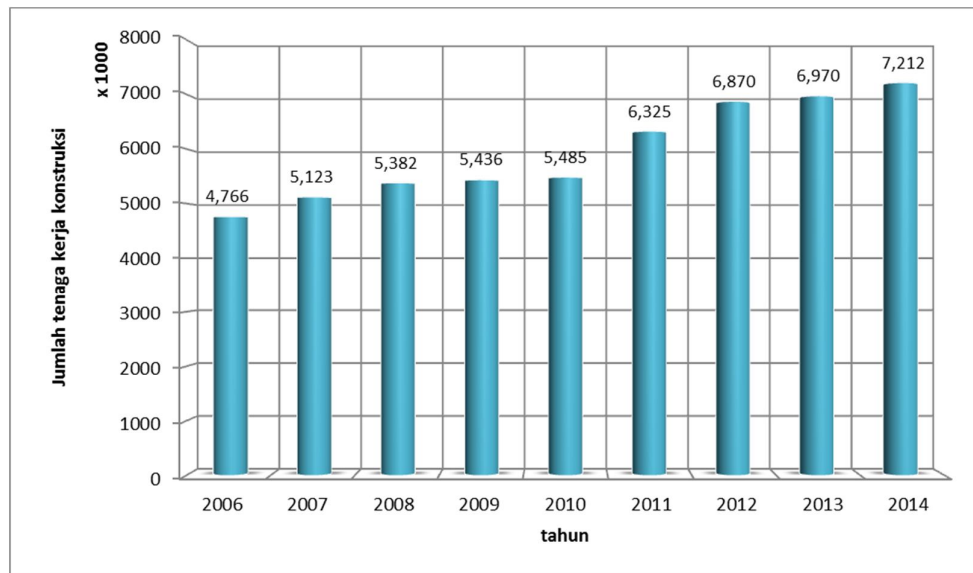
Menurut UUJK, lembaga yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi adalah LPJK. LPJK merupakan suatu lembaga yang independen dan mandiri, terdiri atas LPJK Nasional yang berkedudukan di ibu kota negara dan LPJK Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Lembaga ini beranggotakan wakil-wakil dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi serta instansi pemerintah terkait. Menurut Asnudin (2008), proses registrasi yang telah dijalankan oleh LPJK beberapa tahun terakhir secara umum dapat dikerjakan dengan baik, tetapi memerlukan perbaikan pelayanan atau peningkatan mutu pelayanan agar dapat mengakomodir jumlah anggota yang demikian besar, serta melakukan *recruitment* tenaga kerja yang lebih kompeten. Teregistrasinya badan usaha jasa konstruksi serta para tenaga profesional yang telah memiliki sertifikat paling tidak akan mampu menjawab tantangan global yang akan dihadapi usaha jasa konstruksi saat ini (Iwan Nursyirwan Diar, 2007).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian tertentu. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau

penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. Klasifikasi tenaga kerja untuk bidang usaha jasa konstruksi meliputi bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan, dan Manajemen Pelaksanaan. Sedangkan kualifikasi tenaga kerja konstruksi dibagi menjadi dua yaitu tenaga ahli (muda, madya, utama) dan tenaga terampil (kelas I, kelas II dan kelas III). Klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja dalam sebuah proyek konstruksi harus berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang merupakan potret dari kemampuan seseorang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerjanya.

Dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas perlu tenaga kerja konstruksi yang berkualitas, baik tenaga ahli maupun tenaga terampil. Tenaga kerja disebut berkualitas adalah tenaga kerja yang kompeten di bidangnya yang telah mengikuti proses *assessment* atau penilaian. Tenaga kerja yang telah dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat sebagai bukti kompetensi. Sertifikat itu berfungsi seharusnya sebagai bukti kompetensi, maka pemegang sertifikat akan memperlakukan sertifikat sebagai bagian dari kebanggaan diri, bukti kemampuan sekaligus pengakuan terhadap keilmuan yang dimilikinya.

Menurut Masriyanto dan Hasto A.S. (2014), jumlah tenaga kerja konstruksi kita dari masa ke masa semakin meningkat. Tahun 2004 BPS mencatat penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha konstruksi adalah 4,6 juta orang. Kemudian meningkat selama satu dekade, di tahun 2014 menjadi 7,2 juta orang. Pertumbuhan tenaga kerja konstruksi dari tahun ke tahun secara detail ini dapat dilihat pada gambar 1.1.



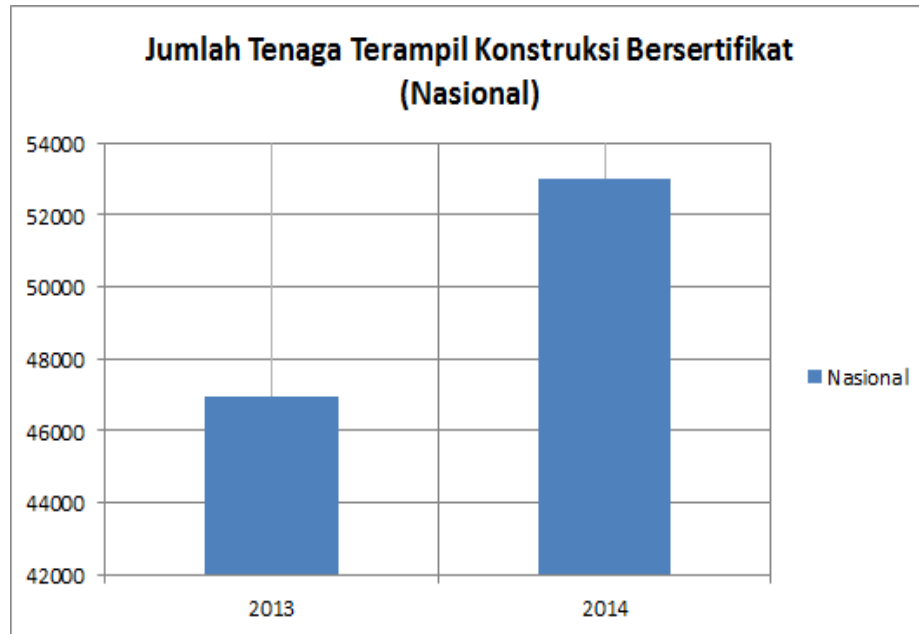
Gambar 1.1 Pertumbuhan Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia
(Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional/Sakernas BPS 2006-2014)

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang banyak bukan tanpa persoalan. Jika menggunakan pendekatan kajian yang dilakukan Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka komposisi tenaga kerja konstruksi terdiri dari : tenaga ahli 10 %, tenaga terampil 30 % dan tenaga tidak terampil 60 %. Bila diuraikan dengan tingkat pendidikan dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi, maka komposisi tenaga kerja konstruksi Indonesia yang paling besar adalah unskilled labour (tenaga kerja kasar/ tidak terampil) sekitar 76% .

Pendidikan unskilled labour adalah SMP/SLTP dan SD, bahkan belum tamat SD. Mereka yang berpendidikan SMA maupun maupun SMK/ Kejuruan hanya 21%. Mereka ini disebut sebagai tenaga terampil. Sedangkan mereka yang berpendidikan Diploma maupun perguruan tinggi dikategorikan tenaga ahli dengan porsi 4%. (LPJKN-BPS, 2013). Artinya, sebagian besar dari tenaga ahli dan terampil Indonesia belum bersertifikat.

Pendidikan	2008	2011	2012	2013	%	Keterangan
≤ SD	2,915,592	3,293,287	3,501,450	3,630,051	53%	Unskilled
SMTA	1,275,429	1,557,475	1,665,910	1,554,402	23%	
SMTA Umum	637,725	750,495	791,402	1,431,882	21%	Terampil
SMTA Kejuruan	407,149	514,339	573,724			
Diploma I/II/III Akademi	56,576	60,558	61,799	70,425	1%	Ahli
Universitas	147,494	163,627	197,377	198,641	3%	
Jumlah	5,438,965	6,339,781	6,791,662	6,885,401	100%	

Tabel 1.1 Distribusi Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Pendidikan (2008-2013)
(Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional/Sakernas BPS 2008-2013)



Gambar 1.2 Jumlah Tenaga Terampil yang sudah tersertifikasi tahun 2013-2014
(Sumber: www.bps.go.id diakses tanggal 07 Desember 2015)

Persoalan berikutnya adalah perbandingan jumlah tenaga terampil dengan jumlah badan usaha nasional yang bersumber dari beberapa wilayah Indonesia sangat timpang sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2.

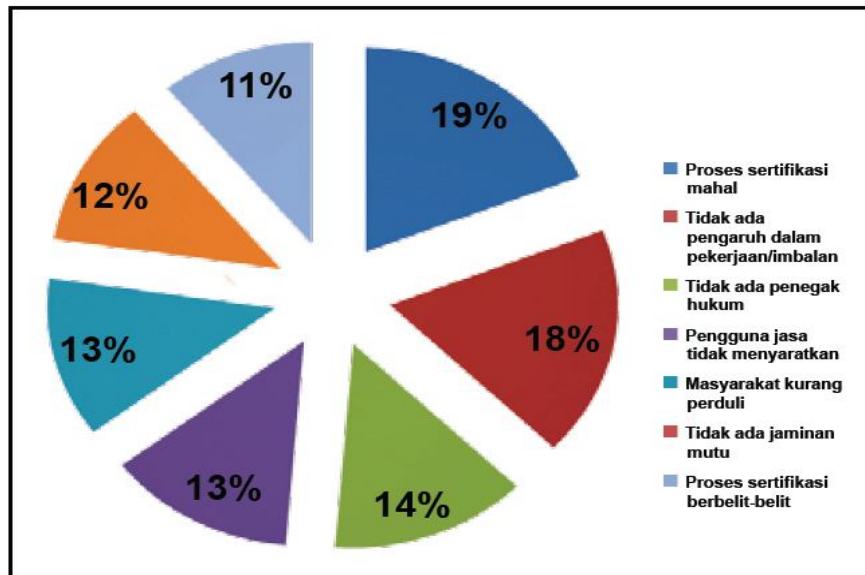
Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi dengan Jumlah Badan usaha

No	Provinsi	Jumlah Badan Usaha	Jumlah Tenaga Terampil Sesuai Kualifikasi	Jumlah Tenaga Terampil Sesuai Kualifikasi/ Badan Usaha
1	Sumatera Utara	6200	2079	33.53%
2	DKI Jakarta	5961	1943	32.60%
3	Jawa Barat	9513	4706	49.47%
4	Jawa Timur	11924	2189	18.36%
5	Jawa Tengah	9951	4619	46.42%
6	Di Jogjakarta	943	1214	128.74%
7	Kalimantan Timur	5314	2355	44.32%
8	Sulawesi Selatan	5466	1809	33.10%
Total		55272	20914	37.84%

(Sumber: www.gis.lpjik.net diakses tanggal 07 Desember 2015 LPJK, 2015 Kemen. PUPR)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dengan perkembangan infrastruktur yang sedemikian pesat ternyata prosentase tenaga terampil yang bersertifikat (sesuai kualifikasi) dibandingkan dengan jumlah badan usaha sangat kecil. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah konsep sertifikasi dan registrasi yang berlaku sekarang ini sudah tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil konstruksi atau tidak.

Menjadi insinyur atau arsitek (red: tenaga ahli) ada sekolahnya, yaitu fakultas teknik di setiap universitas yang jumlahnya menjamur di seluruh negeri dengan tingkat persaingan tinggi. Tetapi dominasi lulusan fakultas teknik justru tidak bekerja di sektor konstruksi, melainkan di sektor perdagangan, keuangan dan jasa. Sedangkan, menjadi tukang, atau menjadi tenaga terampil konstruksi jarang bisa kita temukan atau bahkan tidak ada sekolahnya. SMK jurusan teknik bangunan yang jumlahnya mencapai 595 (433 negeri dan 162 swasta) pun mengalami kemerosotan jumlah peminat (Kemendikbud, 2014). Ketiadaan sertifikat dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi titik kritis dari kualitas SDM konstruksi, khususnya tenaga terampil. Ini berpengaruh kepada sikap kerja (*attitude*), kedisiplinan dan produktivitas tenaga kerja.



Gambar 1.3 Hasil Kuesioner Penyebab Rendahnya Kepemilikan SKA
(Sumber: Buku Konstruksi Indonesia (2012))

Penelitian mengenai rendahnya kepemilikan SKA pernah dilakukan di tahun 2012 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kepemilikan SKA adalah : proses sertifikasi yang mahal (19%), tidak ada pengaruh dalam pekerjaan /imbalan (18%), tidak ada penegakan hukum (14%). Penelitian serupa untuk tenaga kerja konstruksi terampil jarang dilakukan mengingat selama ini SKTK tidak dilampirkan dalam persyaratan pengadaan barang dan jasa (lelang), padahal tenaga kerja konstruksi terampil merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi. Ketentuan tenaga kerja konstruksi terampil bersertifikat belum disyaratkan menunjukkan pada beberapa posisi jabatan dalam proyek, terutama untuk posisi mandor, operator dan tukang. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan kontraktor tidak mampu menyiapkan sertifikat untuk posisi tenaga kerja tersebut dan dengan demikian proyek masih bisa dilaksanakan.

Banyak pihak yang belum memikirkan tentang peningkatan kepemilikan SKTK. Melihat berbagai persoalan yang diuraikan diatas penulis merasa perlu mengangkat topik ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sertifikasi Keterampilan Kerja Tenaga Kerja Terampil Konstruksi”**. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan rendahnya tenaga kerja konstruksi terampil yang bersertifikat.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga terampil konstruksi?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi dan registrasi keterampilan kerja tenaga kerja konstruksi serta faktor apa yang dominan?
3. Apa rekomendasi yang diusulkan untuk memperbaiki pelaksanaan sertifikasi dan registrasi keterampilan kerja tenaga kerja terampil konstruksi ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

1. Mengetahui pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja terampil konstruksi,
2. Mengetahui faktor – faktor apa saja dan faktor – faktor yang dominan mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi dan registrasi keterampilan kerja tenaga kerja terampil konstruksi,

3. Menyusun rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja terampil konstruksi.

1.3.2 Manfaat

1. Manfaat bagi para pemangku kepentingan (LPJKN, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Asosiasi Profesi, Institusi Diklat, Tenaga kerja terampil konstruksi :
 - a. Memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan mengenai evaluasi pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja terampil konstruksi,
 - b. Memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan mengenai faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi dan registrasi keterampilan kerja tenaga kerja terampil konstruksi,
 - c. Memberikan gambaran kepada para pemangku kepentingan dalam mengambil langkah solusi untuk mempercepat dalam mengambil langkah solusi untuk memperbaiki pelaksanaan pada sertifikasi dan registrasi tenaga kerja terampil konstruksi.
2. Manfaat bagi Penulis:

Mendukung dan meningkatkan keilmuan penulis untuk mengaplikasikan manajemen proyek konstruksi khususnya dalam pengelolaan tenaga kerja konstruksi.

1.4. Ruang Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan dan batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja terampil konstruksi,

Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah penerapan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja terampil konstruksi dari awal hingga akhir.
2. Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu yang diterbitkan oleh LPJK .
3. Data yang diperlukan untuk penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder didapatkan dari studi literatur atau dokumen, sedangkan data primer didapatkan dari wawancara, observasi langsung maupun penyebaran kuisioner.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Terdiri dari Kajian Peraturan terkait sertifikasi dan registrasi Tenaga Kerja Konstruksi, Pengertian Proyek, Manajemen Proyek Konstruksi, Tenaga Kerja

Konstruksi dan riset-riset terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Terdiri dari kerangka konseptual penelitian, metode pengumpulan data, operasional variabel dan metode analisis data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Terdiri dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja terampil konstruksi, pemetaan dan analisis faktor yang dominan, analisis hubungan antar faktor, serta penyusunan rekomendasi untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja terampil konstruksi.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya.